TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI KARYA DIGITAL BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) PADA MARKETPLACE DI INDONESIA

Nova Monaya¹, Hidayat Rumatiga², Muhamad AdamSyahrurrohaz Widayat³

Universitas Djuanda Bogor

Email : Adamsyahrurrohaz2211@gmail.com

Abstrak

NFT (Non-Fungible Token) adalah aset digital unik yang tidak dapat direplikasi atau diduplikasi. NFT memastikan keaslian dan kepemilikan unik dari aset digital, seperti seni digital, musik, item dalam game, dan video pendek. Setiap NFT memiliki sertifikat kepemilikan digital yang dicatat pada buku besar bersama yang dikenal sebagai blockchain. Untuk saat ini aktivitas jual beli umumnya menggunakan Opensea sebagai wadah pertemuan penjual dan pembeli. Pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana mekanisme transaksi di marketplace indonesia yang dapat diakses melalui laman website serta aplikasi smarphone mungkin masyarakat indonesia belum sepenuhnya mengetahui NFT dikarenakan bisa dibilang baru populer selepas tahun 2021, maka harus mempertimbangkan hukum mengenai kelayakan NFT sebagai salah satu tempat jual beli karya digital dengan mempertimbangkan pada aspek kemanfaatanmaupun kemudaratannya di dalamnya. Agar terhindar dari *Gharar* dalam bertransaksi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta membahas bagaimana praktik jual beli NFT di indonesia dan penulis menggunakan tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme jual beli NFT di indonesia. Metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis normatif, dilakukan dengan sumber data sekunder dan perundang-undangan, Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, angket serta pendapat ulama usul fiqh. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penggunaan alat tukar hukumnya haram jika ditinjau dengan pendekatan masalah mursalah dan maqasid syariah.

Kata Kunci: Analisis, Non-Fungible Token, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Cryptocurrency

Abstract

NFTs (Non-Fungible Tokens) are unique digital assets that cannot be replicated or duplicated. NFTs ensure authenticity and unique ownership of digital assets, such as digital art, music, in-game items, and short videos. Each NFT has a digital certificate of ownership recorded on a shared ledger known as the blockchain. For now, buying and selling activities generally use Opensea as a meeting place for sellers and buyers. In this study The author analyzes how the transaction mechanism in the Indonesian

marketplace that can be accessed through the website and the Smartphone application. Maybe the Indonesian people do not fully know NFT because it is arguably only popular after 2021, so they must consider the law regarding the feasibility of NFT as a place to buy and sell digital works by considering the aspects of benefits and harms with the aim of avoiding harm in the future. The existence of this study aims to examine how the practice of buying and selling NFTs in Indonesia and the author uses a review of the problem of *mursalah* on the practice of buying and selling NFTs in Indonesia. The method used by research is normative juridical, carried out with secondary data sources and legislation, the data collection process is carried out using literature studies, questionnaires and sampling. While the data analysis method uses a descriptive method. The results of the study suggest that The use of legal means of exchange is haram when viewed with the approach of *masalah mursalah* and *maqasid sharia*.

Keywords: *Analysis, Non-Fungible Token, Intellectual Property Rights, Copyright, cryptocurrency*

PENDAHULUAN

Indonesia sedang berada dalam tahap Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah konsep yang mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. dengan upaya untuk menerapkan teknologi internet dan digitalisasi dalam berbagai sektor industri, sambil juga memasuki era *Society 5.0* yang menekankan pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bidang teknologi terbaru adalah blockchain, merupakan database catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer global. (Shekhar Sarmah Simanta, 2018).

Industri teknologi saat ini mendorong perkembangan mata uang kripto. Sejalan dengan inovasi berbasis blockchain, muncul aset yang merepresentasikan kepemilikan aset dalam bidang seni digital, yaitu Non-Fungible Token (NFT). NFT merupakan token yang digunakan dalam blockchain untuk membuktikan kepemilikan atas suatu aset digital, yang berupa musik, video, foto atau koleksi seni lainnya yang mayoritas gambar dan gambar bergerak.

NFT sendiri dapat diartikan sebagai aset digital yang mempunyai sertifikat kepemilikan digital atas benda dan barang secara eksklusif. Dimana transaksi jual beli NFT ini dapat di kaitkan dengan konsep jual beli dalam Islam berkaitan dengan pemenuhan syarat, rukun serta prinsip jual beli yang sudah diatur dalam Hukum Ekonomi Islam. Selain itu di dalam transaksi NFT sering menggunakan *cryptocurrency* untuk membeli NFT di Indonesia, dapat menggunakan Ether atau mata uang kripto lainnya yang diterima oleh pasar NFT seperti Beberapa pasar NFT yang dikembangkan oleh Indonesia dan internasional termasuk OpenSea, Baliola, Paras.id, dan TokoMall.

Di Indonesia hukum dari *cryptocurrency* sebagai alat tukar sendiri diharamkan. Hal ini berdasar pada Fatwa MUI yang ditetapkan pada Forum Ijtima Ulama Indonesia. Keharaman terkait *cryptocurrency* ini tentunya menjadi point tersendiri yang dapat menjadi pertimbangan terkait Hukum Dari transaksi NFT di Indonesia. Di Indonesia, transaksi jual beli NFT masih dibidang transaksi model baru. Dilihat dari segi perijinan, transaksi NFT masih belum memiliki perijinan atau ilegal. (Bungaran, Maret 18, 2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang sering kali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (Philips Dillah, 2015). biasanya hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (menelaahan terhadap literatur).

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara Studi Kepustakaan (Library Research). Penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelusuran kepustakaan adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan permasalahan terhadap masalah.

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada situasi saat ini. (H Ishaq, 2017). Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif

analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan transaksi karya digital berbasis *non-fungible* token pada *marketplace* di Indonesia yang kemudian akan dianalisis dengan pandangan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam pembahasan ini penulis menggunakan 2 metode pendekatan yaitu *Maqasid Syariah* (tujuan hukum Islam) dan *Maslahah Mursalah* (kaidah fiqh).

Didalam agama Islam, prinsip dalam muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini sama dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

لَأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Transaksi jual beli dalam hukum ekonomi Islam didasarkan pada rukun-rukun yang harus dijalankan agar sah menurut *syara’*. Adapun rukun tersebut antara lain adalah subjek akad atau para pihak yang melaksanakan jual beli, objek akad atau barang yang dijual belikan, dan yang terakhir sighat atau ucapan ijab kabul atau penerimaan barang. Adapun praktek jual beli NFT jika ditinjau dari sarat dan rukun jual beli dalam hukum ekonomi islam adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli dapat dianggap sebagai *al-bai’ain fi al-bai’ah* dalam kajian fiqh yaitu dua orang dalam satu transaksi. yang terlibat dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks ini penjual dan pembeli mempunyai akun NFT sebagai wadah pertemuan jual beli. Mereka menjalankan perjanjian didalam NFT itu sendiri dengan *smart contract* secara otomatis yang memfasilitasi perjanjian secara digital hal inisesuai dengan kaidah fiqh dalam jual beli, meskipun bukan dalam bentuk interaksi langsung antara individu secara fisik. Dalam Hukum Ekonomi Islam terkait subjek akad itu harus dipenuhi agar sesuai dengan *syara’*. Adapun syarat yang dimaksud adalah: ‘*Aqil*’ (berakal) *tamyiz* dan cakap dalam bertindak secara hukum memiliki usia diatas 18 tahun biasanya ini memasuki usia yang matang dalam memutuskan mana hal baik dan mana hal yang tidak baik. Dari alasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa subjek jual beli dalam NFT sudah dapat dikatakan memenuhi syarat dari subjek jual beli menurut Hukum Ekonomi Islam.

b. Penggunaan shigat (lafal ijab dan kabul). Didalam NFT tidak ada ucapan secara langsung melainkan melalui *smart contract*. yang dimana penjual menawarkan harga yang telah ditetapkan melalui platform NFT penulis mengambil contoh melalui website Tokomall yang ada di indonesia jika sepakat harga dankeaslian atau keunikan suatu karya jika setuju dengan harga yang ditetapkan maka akan diproses secara otomatis oleh website tersebut. menurut penulis jika kedua

belah pihak saling mengetahui mengenai objek transaksi, pelaku atau kreator seni, harga yang ditetapkan maka sah dalam rukun jual beli hal ini dikuatkan oleh pendapat Imam Ghazali yang menyatakan bahwa jual beli tanpa sighthat adalah boleh, asalkan ada kesepakatan dan kerelaan di antara kedua belah pihak. dimana objek transaksi harus halal dalam NFT berarti keaslian suatu karya harus dipertanyakan asli atau tidak dan harga harus sesuai yang diperjanjikan agar terhindar dari penipuan.

c. Objek akad atau dalam fiqh disebut dengan *ma'kud alaih* adalah orang yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum Allah dan aturannya didalam transaksi berarti perbuatan para pihak untuk transaksi dengan barang atau objek seni atau NFT itu sendiri. Dan harus sesuai syariat islam contohnya seperti kepemilikan suatu karya harus orisinil, tidak melibatkan barang-barang haram seperti judi dan tidak mengandung unsur *pornography*. Objek NFT biasanya terdiri dari lukisan, gambar, karya tulis, benda bergerak (*GIF*), Token game. Objek NFT dikategorikan kedalam Hak Kekayaan Intelektual adapun pandangan Hukum Ekonomi Islam yaitu *huquq maliyah* (hak kekayaan) dan dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud alaih*) hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa ini membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (Hak CIPTA) dalam perspektif hukum Islam. sebelum membeli karya NFT kita harus meninjau atau mempertimbangkan karya digital yang menjadi *underlying aset* dari NFT tersebut apakah melanggar hukum islam atau tidak. *underlying asset* itu sendiri adalah aset yang dijamin hak karya seni. Ini mencakup jaminan originalitas dan keaslian dari karya seni tersebut agar memastikan keadilan serta menghormati karya orang lain.

Jika di analisis jenis transaksi NFT pada Marketplace Indonesia termasuk ke dalam *ba'i al-mu'athoh*, yaitu bentuk jual beli yang dilakukan di mana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun. NFT itu sendiri menggunakan teknologi *smart contract*. *Smart contract* pada NFT (*non-fungible token*) adalah mekanisme yang dieksekusi secara otomatis yang mengimplementasikan perjanjian penjualan antara pemilik dan pembeli. *Smart contract* juga memverifikasi apakah syarat kontrak telah dipenuhi dan dapat menjalankan syarat-syarat tersebut tanpa perlu perantara atau otoritas pusat. Kontrak ini pada dasarnya adalah kumpulan janji dalam bentuk digital.

Dalam *ba'i al-mu'athoh* penjual dan pembeli melaksanakan kewajibannya dalam transaksi penjual menyerahkan objek barang dan pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati melalui *platform* NFT seperti *Tokomall* kemudian mendapat uang berupa *cryptocurrency* setelah transaksi berhasil masuk ke *metamask* sebagai dompet digitalnya. Sedangkan pembeli atau kolektor membayar NFT yang

di beli sesuai dengan harga yang diajukan oleh kreator kemudian setelah transaksi berhasil pembeli atau kolektor akan menerima NFT yang ia beli dalam bentuk digital dan memperoleh ID Token Kepemilikan. Serta harus menerapkan prinsip sama suka (*'an taradin*), dan I'tikad baik. Dengan berjalannya prinsip tersebut maka akan tercapai hikmah dari transaksi jual beli itu sendiri.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari segi syarat dan rukun jual beli dalam transaksi jual beli NFT pada marketplace di Indonesia seperti *Tokomall* secara umum telah memenuhi. Maka dari itu secara hukum jual beli NFT dapat dikatakan sah karena telah terpenuhinya unsur dari jual beli. Namun ada satu hal yaitu terkait dengan alat tukarnya itu sendiri yang dimana untuk membeli serta proses upload karya digital harus menggunakan mata uang *cryptocurrency*. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya adalah haram, hal ini sesuai dengan putusan dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 7 di Jakarta. Seperti yang dijelaskan dalam situs resmi MUI bahwa *cryptocurrency* yang dipakai untuk mata uang hukumnya haram, dikarenakan adanya kandungan *gharar*, *dharar*, berlawanan dengan Peraturan Bank Indonesia No 17 tahun 2015 dan Undang-Undang No 7 tahun 2011.

Untuk melihat transaksi jual beli NFT di Indonesia diperbolehkan secara syariah, penulis merujuk kepada salah satu metode untuk menetapkan hukum Islam atau *syara'*, yaitu metode *maslahah mursalah* dengan mempertimbangkan berbagai aspek *maslahat* dan *mudarat* yang merupakan tujuan utama dari *maqasid syariah* dalam hukum Islam. *maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah SWT, namun terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudaratan yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya dan menjauhi kerusakan.

menurut Amir Syarifudin dalam buku *Ushul Fiqih*, *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara* (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan *syara* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dikutip dalam buku Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A Kesesuaian *al-maslahah al-mursalah* dengan pembaharuan hukum Islam adalah karena metode ini bertumpu pada mashlahah yang memang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Relevansi al-maslahah ini dengan pembaharuan hukum Islam terletak sifat al-mashlahah yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratatan. Dengan pertimbangan ini, maka berbagai aktivitas yang mendatangkan manfaat secara umum dan menolak kemudaratatan dapat dipertimbangkan sebagai hukum syarat selama tidak ada nash yang secara tegas mencela atau menolaknya.

bahwa jika dilihat mengenai aspek manfaat dan aspek risiko atau mudarat yang terdapat dalam transaksi jual beli digital NFT, dapat dilihat bahwa aspek manfaat sebanding dengan aspek mudaratnya. Namun, jika dilihat mengenai rukun jual beli, proses transaksi NFT sebenarnya hampir sempurna hanya saja penggunaan *crypto* terdapat hal yang dianggap haram dalam nilai atau alat tukarnya, yaitu "saman" yang mengandung unsur yang dapat membuat transaksi menjadi haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerugian atau bahaya).

Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh al-aslu fi al-mu'amalah al-ibahah illa ma dalla 'ala tahrimiha*, artinya hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Atas dasar ini, setiap kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia adalah boleh selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

NFT merupakan produk turunan dari kripto yang berbasis pada jaringan blockchain, sehingga NFT masuk ke dalam ekosistem blockchain di mana NFT tidak dapat diperjualbelikan tanpa menggunakan mata uang kripto. Oleh karena itu, sejalan dengan beberapa kaidah *fiqh* yang berkenaan dengan masalah *mursalah*, yaitu:

ذَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan".

Berdasarkan kaidah ini, bahwa mencegah kerusakan atau kemudaratatan lebih diutamakan atau wajib didahulukan dari pada mengambil manfaat. Adapun mengenai praktik Jual beli karya digital NFT tersebut memiliki banyak manfaat, baik untuk seniman, kreator maupun kolektor, namun juga mengandung kemudaratatan, yang mana kemudaratatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah terkait dengan alat pembayarannya dan bertentangan dengan regulasi

hukum yang ada di Indonesia, yakni bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015. Sehingga berdasarkan kaidah fikih tersebut, sebaiknya transaksi jual beli digital NFT perlu dilakukan dengan cara berhati-hati karena mengandung unsur kemudharatan di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) merupakan aset satu-satunya di dunia digital yang dapat dibeli dan dijual seperti properti yang lain, hanya saja tidak memiliki bentuk fisik. NFT dapat dibeli dan dijual melalui platform-platform digital, seperti situs *Tokomall*, yang diklasifikasikan sebagai transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE. di Marketplace Indonesia menggunakan mata uang cryptocurrency sama halnya dengan marketplace terbesar *Opensea* berupa *Etherium*, *Polygon (matic)*, *Klaytn*, dan *Solana*. Sebelum melakukan transaksi pengguna harus memiliki *wallet*, akun *marketpace* dan mata uang *cryptocurrency* yang di konversi melalui aplikasi *metamask* sebagai dompet digital *cryptocurrency*. Dalam *marketplace* di Indonesia seperti *tokomall* tersedia dua pilihan penjualan yaitu dengan cara *fix price* (harga yang sudah ditetapkan dalam suatu karya NFT) dan *time auction*. (jual beli yang menggunakan waktu seperti lelang). Didalam transaksi tidak melibatkan pihak ketiga dalam bertransaksi karena menggunakan sistem *peer to peer* dalam sistem *blockchain*. NFT merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual maka dalam transaksi jual beli NFT menimbulkan dua kepemilikan hak yaitu kepemilikan Hak Cipta bagi pencipta atau kreator NFT dan kepemilikan Hak Kepemilikan bagi orang yang membeli karya tersebut atas karya yang ia beli sebagai kolektor. Pengalihan Hak Milik atas Hak Cipta timbul dari kontrak hukum yang terjadi pada proses transaksi jual beli berlangsung yang dimana dalam kontrak berisi seperti kontrak *address* NFT, *id token*, alamat kreator, alamat pemilik, serta riwayat transaksi.

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam hukum dari transaksi jual beli NFT adalah sah. karena telah terpenuhinya syarat, rukun dan prinsip jual beli seperti yang diatur dalam peraturan terkait jual beli dalam Hukum Ekonomi Islam. Akan tetapi Dalam konteks ini, beberapa ulama menyimpulkan bahwa transaksi aset NFT yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dapat dianggap haram. melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Namun, pandangan ini masih menjadi perdebatan dan penilaian ulama yang berbeda. Jika melihat dalam kaidah fiqh yang berkenaan dengan masalah *mursalah* "Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan" maka untuk menghindari dari kemudharatan atau kerugian dalam jual beli NFT hukumnya haram karena sesuai dengan kaidah fiqh tadi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang NFT, secara mendalam karena pada penelitian ini kekurangannya terdapat pada data responden terbatas yang hanya 20 dari sekian banyak pengguna

NFT karena sulit menemukan pengguna yang aktif dalam bertransaksi melalui NFT di *marketplace* indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Simanta, Shekhar Sarmah. "Understanding Blockchain Technology: Abstracting the Blockchain" 8, no. 2 (2018): 23–29.
- Umar, Mukhsin Nyak. "Al-Mashlahah Al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam." Turats, 2017.

Buku

- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.
- Dillah, Philips. "Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum/Suratman," 2015.
- Ishaq, H. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi." *Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta*, 2017.

Sumber Website

- Mengenal Revolusi Industri 5.0*, kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 1 Februari 2024, pukul 22.55 wib.
- Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency* – Majelis Ulama Indonesia (mui.or.id), diakses pada tanggal 1 februari 2024, pukul 23.00 wib.
- Kristian Bungaran, "Legalitas Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia", <https://www.dhp-lawfirm.com/legalitas-transaksi-non->, diakses pada tanggal 1 februari 2024, pukul 23.04 wib.
- Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency* (mui.or.id), diakses pada tanggal 1 februari 2024 pada pukul 00.00 wib